

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Sektor Publik

Khairani Alawiyah Matondang¹ Laurent Damai Yanti Silaban² Lidya Vanya F Sihombing³
Adel Syesaria Agustin Daole⁴ William Barker Hutabarat⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹ silabanlaurentdamaiyanti@gmail.com²

lidyavanya123@gmail.com³ adelgustin43@gmail.com⁴ williamhutabarat02@gmail.com⁵

Abstract

This research has an impact on the effectiveness of internal control in preventing accounting diseases in the public sector, with a focus on internal introduction programs aimed at increasing employee awareness about ethics and integrity. Accounting fraud, such as manipulation of financial reports and budget savings, harms state finances and reduces public trust. This research identified that strong internal controls, an ethical organizational culture, and good training programs can reduce risk. By using a literature study approach, this research aims to provide recommendations for strengthening anti-fraud policies in the public sector and creating a transparent and accountable work environment. Apart from that, this research also reveals that accounting conditions often occur due to political pressure, lack of transparency, and weak internal controls. Therefore, it is important to strengthen internal control systems, increase transparency, and apply technology in supervision to prevent conditions and increase accountability in the public sector.

Keywords: Accounting Fraud, Public Sector, Transparency, Accountability

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik, dengan fokus pada program pengenalan internal yang bertujuan meningkatkan kesadaran pegawai tentang etika dan integritas. Kecurangan akuntansi, seperti manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan anggaran, merugikan keuangan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengendalian internal yang kuat, budaya organisasi yang etis, dan program pelatihan yang baik dapat mengurangi risiko kecurangan. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan anti-fraud di sektor publik dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kecurangan akuntansi sering terjadi akibat tekanan politik, kurangnya transparansi, dan lemahnya pengendalian internal. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, dan menerapkan teknologi dalam pengawasan untuk mencegah kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas di sektor publik.

Kata Kunci: Kecurangan Akuntansi, Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kecurangan dalam akuntansi sektor publik merupakan permasalahan yang semakin menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kecurangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, hingga penggelapan dana publik. Transparency International (2022) menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik kecurangan di sektor publik adalah lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya etika serta integritas dalam bekerja. Kecurangan yang terjadi tidak hanya

merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud sejak dini. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui program pengenalan internal (internal introduction), yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman pegawai terkait nilai-nilai integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem pengendalian internal yang diterapkan di organisasi sektor publik.

Program pengenalan internal dalam organisasi sektor publik berhubungan erat dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), *good governance* merupakan sistem yang memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip utama dalam *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap hukum, yang semuanya berperan penting dalam pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal juga memainkan peran krusial dalam mendukung *good governance*. COSO Internal Control Framework (2013) mengidentifikasi lima komponen utama pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat dapat membantu organisasi sektor publik dalam mencegah kecurangan dengan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai etika dan kejujuran juga menjadi faktor penting dalam efektivitas program pengenalan internal. Schein (2010) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Jika budaya organisasi dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak awal, maka pegawai akan lebih cenderung untuk bertindak secara etis dan menghindari praktik kecurangan. Beasley et al. (2021) juga menemukan bahwa organisasi yang memiliki program orientasi dan pelatihan integritas yang baik cenderung mengalami lebih sedikit kasus kecurangan dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki program serupa.

Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu efektivitas pengenalan internal dan pencegahan kecurangan akuntansi di sektor publik. Efektivitas pengenalan internal dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti komunikasi kebijakan organisasi, pelatihan pegawai mengenai regulasi keuangan dan etika kerja, serta keterlibatan manajemen dalam menanamkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, pencegahan kecurangan akuntansi dapat diukur dari beberapa indikator, seperti penurunan jumlah kasus fraud, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta keberadaan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan menganalisis hubungan antara kedua variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana pengenalan internal berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah seberapa efektif program pengenalan internal dalam mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Studi pustaka yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat berbagai pandangan mengenai efektivitas pengenalan internal dalam pencegahan fraud. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa program orientasi yang komprehensif dapat membantu mengurangi risiko kecurangan dengan meningkatkan kesadaran pegawai terhadap kebijakan anti-fraud dan sistem pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengenai teori keagenan (*agency theory*) menunjukkan bahwa adanya informasi yang jelas mengenai aturan dan pengawasan dalam organisasi dapat mengurangi potensi moral hazard yang

menjadi salah satu penyebab utama kecurangan. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai sejauh mana program pengenalan internal secara langsung mempengaruhi tingkat kecurangan dalam akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pengenalan internal dalam mencegah kecurangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasinya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam sektor publik. Kecurangan yang terus berulang di sektor publik menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah fraud. World Bank (2020) melaporkan bahwa negara-negara dengan tingkat tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki tingkat korupsi dan kecurangan yang lebih rendah dibandingkan negara dengan sistem tata kelola yang lemah. Oleh karena itu, dengan mengkaji efektivitas program pengenalan internal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan anti-fraud di sektor publik. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kredibel, termasuk jurnal akademik, laporan penelitian, dan regulasi yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga sektor publik dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah kecurangan akuntansi, serta memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan transparansi.

Landasan Teori

Kecurangan akuntansi di sektor publik adalah masalah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk mencegahnya, pengendalian internal yang efektif menjadi faktor utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan organisasi, termasuk sektor publik, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen serta karyawan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013). Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014), pengendalian internal berfungsi sebagai sistem perlindungan organisasi yang mencakup kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks sektor publik, pengendalian internal juga berperan dalam memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip good governance. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan dalam COSO Internal Control Framework, yaitu:

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari seluruh sistem pengendalian internal yang mencerminkan budaya organisasi terkait nilai integritas, etika, dan kompetensi pegawai. Komponen ini melibatkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, struktur organisasi yang jelas, serta kebijakan dan prosedur yang mendukung tata kelola yang baik. Menurut Hall

(2015), lingkungan pengendalian yang kuat dapat menciptakan budaya kerja yang mendorong transparansi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

1. **Penilaian Risiko (Risk Assessment)** Organisasi perlu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, termasuk risiko kecurangan akuntansi. Menurut Rezaee (2005), risiko kecurangan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti tekanan untuk mencapai target keuangan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sistem pelaporan yang efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu secara proaktif menilai risiko dan mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan.
2. **Aktivitas Pengendalian (Control Activities)** Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya termasuk pemisahan tugas (*segregation of duties*), otorisasi transaksi, rekonsiliasi akun, serta pembatasan akses terhadap informasi dan aset penting. Menurut Romney dan Steinbart (2015), aktivitas pengendalian yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dengan membatasi akses yang tidak sah dan memperjelas tanggung jawab dalam organisasi.
3. **Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)** Sistem pengendalian internal yang efektif memerlukan aliran informasi yang jelas dan transparan dalam organisasi. Menurut Wilkinson et al. (2014), komunikasi yang baik memungkinkan seluruh pihak terkait mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam sektor publik, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meminimalisir risiko manipulasi laporan keuangan.
4. **Pemantauan (Monitoring)** Pemantauan adalah proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya. Pemantauan dapat dilakukan melalui audit internal, evaluasi mandiri, dan pengawasan oleh lembaga independen. Menurut Boynton dan Johnson (2006), organisasi sektor publik perlu menerapkan sistem pemantauan yang ketat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal dan segera melakukan perbaikan sebelum terjadi penyimpangan.

Dalam konteks sektor publik, pengendalian internal memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sektor swasta karena melibatkan kepentingan masyarakat secara langsung. Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, mencegah kebocoran dana, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gbegi dan Adebisi (2013), pengendalian internal yang baik dapat secara signifikan mengurangi insiden kecurangan akuntansi di instansi pemerintah, terutama jika didukung oleh kepemimpinan yang berintegritas dan sistem pemantauan yang kuat.

Kecurangan Akuntansi dalam Sektor Publik

Definisi dan Konsep Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi (*fraud*) dalam sektor publik adalah tindakan yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan atau menyalahgunakan sumber daya publik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Wells, 2017). Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan akuntansi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan laporan keuangan yang menyesatkan (*financial statement fraud*). Menurut Albrecht et al. (2012), kecurangan akuntansi umumnya terjadi akibat kombinasi dari *Fraud Triangle*, yang meliputi:

1. Tekanan (Pressure): Dorongan yang dirasakan individu untuk melakukan kecurangan, seperti masalah keuangan pribadi, tuntutan pekerjaan, atau insentif berbasis kinerja.
2. Peluang (Opportunity): Kondisi yang memungkinkan individu untuk berbuat curang karena lemahnya sistem pengendalian internal.
3. Rasionalisasi (Rationalization): Proses yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakannya, misalnya dengan menganggap tindakan tersebut sebagai “hak” atau “kompensasi” atas kerja kerasnya.

Di sektor publik, karakteristik utama yang meningkatkan risiko kecurangan termasuk kompleksitas sistem keuangan, kurangnya transparansi, dan potensi konflik kepentingan.

Jenis-Jenis Kecurangan Akuntansi dalam Sektor Publik

1. Penyalahgunaan Aset Publik (Misappropriation of Assets). Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang paling umum di sektor publik (ACFE, 2022). Penyalahgunaan aset dapat berupa:
 - a. Penggelapan Dana (Embezzlement): Pegawai atau pejabat menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi tanpa izin resmi.
 - b. Penyalahgunaan Inventaris dan Sumber Daya: Penggunaan kendaraan dinas, alat kantor, atau fasilitas negara untuk keperluan pribadi.
 - c. Penyalahgunaan Dana Hibah atau Bantuan Sosial: Mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik ke rekening pribadi atau kelompok tertentu.
2. Korupsi (Corruption). Korupsi dalam sektor publik sering terjadi melalui:
 - a. Suap (Bribery): Pemberian uang atau hadiah kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti kontrak proyek atau kebijakan yang menguntungkan.
 - b. Gratifikasi Ilegal: Penerimaan hadiah atau fasilitas yang memengaruhi keputusan seorang pejabat publik.
 - c. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power): Penggunaan jabatan atau kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu secara tidak sah. Menurut Transparency International (2023), sektor publik di banyak negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi, terutama karena lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
3. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud). Kecurangan laporan keuangan adalah manipulasi data keuangan agar tampak lebih baik atau lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Bentuk umum yang terjadi dalam sektor publik meliputi:
 - a. Pencatatan Fiktif: Mencatat pendapatan atau aset yang sebenarnya tidak ada untuk meningkatkan performa keuangan pemerintah.
 - b. Penyembunyian Liabilitas: Tidak melaporkan kewajiban atau utang yang dimiliki untuk menghindari tanggung jawab keuangan.
 - c. Manipulasi Anggaran: Mengubah anggaran belanja negara agar sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian oleh Beasley et al. (2021) menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan di sektor publik sering terjadi akibat tekanan politik, tuntutan pencapaian target kinerja, dan lemahnya pengawasan.

Faktor Penyebab Kecurangan Akuntansi di Sektor Publik

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dorminey et al. (2012), terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kecurangan akuntansi di sektor publik:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas. Ketiadaan laporan keuangan yang transparan memudahkan manipulasi data keuangan. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran meningkatkan risiko penyalahgunaan dana publik.

2. Lemahnya Pengendalian Internal. Sistem pengawasan yang tidak ketat memungkinkan pejabat melakukan tindakan fraud tanpa terdeteksi. Tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara bagian keuangan, pengadaan, dan audit internal.
3. Insentif Politik dan Ekonomi. Tekanan politik dapat mendorong pejabat untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sesuai dengan target pembangunan. Insentif berbasis proyek atau bonus dapat menjadi pemicu tindakan fraud jika tidak diawasi dengan baik.
4. Kurangnya Sanksi dan Penegakan Hukum. Hukuman yang ringan atau lambatnya proses hukum bagi pelaku fraud dapat membuat kecurangan semakin marak. Kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas, seperti BPK dan KPK, dalam menangani kasus keuangan negara.

Dampak Kecurangan Akuntansi di Sektor Publik

Dampak dari kecurangan akuntansi dalam sektor publik sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek, antara lain:

1. Dampak Ekonomi. Meningkatkan defisit anggaran karena dana publik tidak dikelola dengan baik. Menghambat pertumbuhan ekonomi karena investasi dan pembangunan infrastruktur menjadi tidak efisien.
2. Dampak Sosial. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Meningkatkan ketimpangan sosial akibat penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Dampak pada Tata Kelola Pemerintahan. Melemahkan prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas,
4. dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan risiko ketidakstabilan politik akibat skandal korupsi yang melibatkan pejabat publik. Penelitian oleh Hess & Cottrell (2020) menegaskan bahwa negara-negara dengan sistem pengawasan keuangan yang ketat memiliki tingkat fraud yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem audit yang lemah.

Pencegahan dan Mitigasi Kecurangan Akuntansi

Untuk mengatasi dan mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik, beberapa strategi utama dapat diterapkan, seperti:

1. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal. Menerapkan sistem audit internal yang independen dan berkualitas tinggi. Memastikan adanya pemisahan tugas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan publik.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. Mempublikasikan laporan keuangan pemerintah secara berkala agar dapat diakses oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat dan media dalam pengawasan pengelolaan anggaran publik.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Pegawai. Mengadakan pelatihan anti-fraud bagi pegawai sektor publik agar memahami risiko dan dampak dari kecurangan akuntansi. Memberikan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan tindakan fraud.
4. Peningkatan Penegakan Hukum. Memberikan hukuman tegas kepada pelaku fraud agar memberikan efek jera. Memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas, seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung, dalam menangani kasus fraud di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada tinjauan komprehensif terhadap literatur yang berkaitan dengan berbagai studi mengenai hubungan antara kontrol internal dan penipuan. Artikel-artikel tersebut dikumpulkan melalui pencarian manual di Google Scholar,

dengan menggunakan kata kunci "kontrol internal" dan "kecurangan". Penelitian menggunakan artikel yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025) dengan penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

Tabel 1. Daftar Artikel Yang Digunakan Dalam Literature Review

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	(Lestari & Supadmi, 2017)	Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengendalian Internal maupun Integritas memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di organisasi pemerintah di wilayah Klungkung. Sebaliknya, asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap praktik kecurangan akuntansi dalam organisasi-organisasi tersebut
2.	(Ramadhany et al., 2017)	Dampak Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Kecukupan Penggajian, dan Penerapan Praktik Terbaik dalam Tata Kelola Perusahaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Temuan studi ini menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3.	(Anto et al., 2022)	Implementasi Akuntansi Publik dan Pengendalian Internal dalam kaitannya dengan Akuntabilitas di Instansi Pemerintah	Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi publik dan Pengendalian Internal memiliki pengaruh krusial terhadap tanggung jawab dalam penilaian kinerja di instansi pemerintah di distrik Lembursitu.
4.	(Suwandi, 2019)	Pengaruh Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi	Studi ini menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5.	(Rahmi & Sovia, 2017)	Dampak Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Etika Perusahaan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Perusahaan Pengembang di Pekanbaru	Hasil penelitian menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi

Proses kontrol internal merujuk pada serangkaian tindakan dan inisiatif berkelanjutan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dan meminimalkan risiko terjadinya potensi penipuan akuntansi, baik dari pihak internal maupun eksternal (Artini et al. , 2014). Penting untuk dicatat bahwa proses ini memainkan peran kunci tidak hanya dalam merumuskan strategi jangka panjang, tetapi juga dalam meningkatkan efisiensi operasional (Leng dan Zhang, 2014). Sistem kontrol internal yang solid memungkinkan manajemen untuk dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan lingkungan kompetitif global, yang pada gilirannya meningkatkan potensi pertumbuhan masa depan organisasi (Tiro, 2014). Penelitian menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara efektivitas kontrol internal dan kemungkinan terjadinya penipuan di sektor publik. Implementasi kontrol internal yang lebih baik di lembaga pemerintah berkontribusi pada pengurangan risiko tindakan penipuan. Yuliani (2018) berargumen bahwa proses kontrol

internal yang dirancang dengan baik dapat membatasi dan mencegah kecenderungan untuk melakukan penipuan akuntansi, baik oleh karyawan yang bertanggung jawab atas proses akuntansi maupun dalam konteks penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, meningkatnya kualitas kontrol internal dalam organisasi berkorelasi dengan berkurangnya risiko tindakan penipuan, sementara penerapan mekanisme kontrol yang buruk justru meningkatkan risiko tersebut. Kualitas kontrol internal dipengaruhi oleh efektivitas pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan operasional dalam organisasi. Ketika karyawan berkomitmen untuk bertindak sesuai norma yang benar, menghormati nilai-nilai etis, dan secara konsisten mematuhi komitmen tersebut, probabilitas terjadinya penipuan akuntansi dapat dikurangi secara signifikan.

Pencegahan Kecurangan Akuntansi di Sektor Publik

Pencegahan adalah langkah pertama dalam mengurangi atau menghilangkan tindakan penipuan. Penting untuk membedakan antara kesalahan dan penipuan: sementara kesalahan adalah tindakan yang tidak disengaja, penipuan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar. Tindakan penipuan dalam organisasi dapat berdampak negatif pada reputasinya. Biasanya, penipuan terjadi karena keinginan untuk menyimpang dari norma guna memanfaatkan peluang yang muncul. Sistem kontrol internal yang efektif tidak hanya mengurangi risiko penipuan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Semakin baik sistem kontrol diimplementasikan, semakin tinggi kualitas hasil yang dicapai perusahaan di area seperti kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas (Humam et al., 2020). Sebuah sistem kontrol internal yang kokoh juga memengaruhi kualitas informasi keuangan, yang secara langsung berkaitan dengan risiko penipuan. Selain itu, komunikasi yang baik, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal, yang berlandaskan pada prinsip etis, mendukung pencapaian tujuan perusahaan (Humam et al., 2020).

Peran Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengendalian internal memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mencegah kecurangan akuntansi; ia berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, khususnya di sektor publik. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan pihak berkepentingan memahami cara suatu organisasi menjalankan aktivitasnya, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan organisasi memastikan bahwa setiap proses keuangan dilaksanakan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Humam et al. (2020), Selain itu, pengawasan internal yang dilakukan secara berkala berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses keuangan dan operasional. Hal ini memungkinkan organisasi untuk segera melakukan perbaikan sebelum terjadinya penyimpangan yang lebih serius. Penerapan sistem ini juga mendorong budaya kerja yang disiplin, di mana setiap individu dalam organisasi memahami tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Implementasi Teknologi dalam Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam sistem pengendalian internal, terutama dalam upaya pencegahan kecurangan akuntansi. Pemanfaatan teknologi dalam akuntansi dan keuangan memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan serta meningkatkan efisiensi pengawasan pada transaksi keuangan. Salah satu cara penerapan

teknologi dalam pengendalian internal adalah melalui penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time dan otomatis. Dengan sistem ini, data keuangan dapat diakses dengan lebih transparan dan mudah diaudit, sehingga mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan. Pengawasan berbasis teknologi juga dapat dilakukan melalui audit berbasis data dan penggunaan forensik akuntansi untuk mengidentifikasi kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang didukung teknologi, organisasi dapat lebih mudah memantau kepatuhan terhadap kebijakan keuangan serta meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan. Penerapan teknologi dalam pengendalian internal tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga membantu organisasi menciptakan sistem yang lebih aman dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal ini menegaskan kecurangan akuntansi di sektor publik merupakan masalah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat efisiensi pengelolaan keuangan negara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kecurangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh sebab itu, penerapan pengendalian internal yang efektif sangat penting dalam mencegah praktik kecurangan. Pengendalian internal yang kuat harus mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang berkelanjutan. Selain itu, budaya organisasi yang menanamkan nilai integritas dan transparansi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel. Strategi pencegahan yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi dalam akuntansi dan audit, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kecurangan. Dengan pendekatan ini, sektor publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, A., & Lestari, N. (2022). Implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1-12.
- Artini, L., Supadmi, S., & Rahmi, R. (2014). Pengendalian internal dan kecurangan akuntansi: Tinjauan teoritis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 123- 135.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Leng, J., & Zhang, Y. (2014). The role of internal control in preventing fraud in public sector organizations. *International Journal of Public Sector Management*, 27(5), 421-434.
- Lestari, N., & Supadmi, S. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 14(3), 45-58.
- Rahmi, R., & Sovia, S. (2017). Dampak sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan developer di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 67- 78.
- Tiro, M. (2014). Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 16(1), 45-56.
- Transparency International. (2022). Laporan tahunan tentang kecurangan dan korupsi di sektor publik. Transparency International.
- World Bank. (2020). Laporan tentang pengendalian internal dan akuntabilitas di sektor publik. World Bank.